

Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Public Service Innovation in Kecamatan Mallawa Maros Regency

Aprilia Hapsari¹, Muhammad Guntur², Novayanti Sophia Rukmana S.³

Universitas Negeri Makassar¹²³

Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan

apriiahapsari74@gmail.com¹

Naskah diterima tanggal 3 November 2021. Naskah direvisi tanggal 6 Desember 2021.

Naskah disetujui tanggal 10 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mengenai proses pelayanan publik dalam laporan pertanggungjawaban dana desa yang saat ini diterapkan dan melakukan penawaran konsep aplikasi yang berfokus pada laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Tellumpanaue dan Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi terhadap masalah yang ada dengan sistem pelayanan sebelumnya yaitu dengan aplikasi PAKDES. Aplikasi ini dirancang sebagai salah satu media yang dapat memudahkan aparatur desa dalam melakukan pelaporan dana desa yang dapat diakses melalui *smartphone*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang akan menjabarkan secara lebih dalam fokus masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung serta beberapa aparatur desa yang terlibat yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Operator Desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada peroses penelitian, peneliti menemukan data bahwa proses pertanggungjawaban yang saat ini diterapkan di Desa Barugae dan Desa Tellumpanaue Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah mengalami pergeseran sistem, dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual, saat ini telah beralih ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Meskipun belum melakukan uji coba, namun secara keseluruhan, aparatur desa memiliki ketertarikan dengan desain *prototype* aplikasi yang peneliti tawarkan, yaitu aplikasi Pakdes karena memiliki tampilan fitur dan fungsi yang lebih fleksibel dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum. Hal ini sangat mendukung beberapa prinsip pelayanan yang seharusnya ada dan diterapkan, salah satunya prinsip partisipatif yang diharapkan agar segera dilakukan uji coba aplikasi.

Kata kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Dana Desa; Aplikasi Pakdes

Abstract

This study aims to describe in depth the public service process in village fund accountability reports that are currently being implemented and offer an application concept that focuses on village fund accountability reports in Tellumpanaue Village and Barugae Village, Mallawa District, Maros Regency. Therefore, the authors provide

solutions to existing problems with the previous service system, namely the PAKDES application. This application is designed as a medium that can facilitate village apparatuses in reporting village funds that can be accessed via smartphones. This study uses a descriptive qualitative research method which will describe more deeply the focus of the problem to be studied. The data sources were obtained through supporting documents and several Village Apparatuses, in this case those involved were the Village Head, Head of Finance and Village Operators. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In the research process, researchers found data that the accountability process currently implemented in Barugae Village and Tellumpanuae Village, Mallawa District, Maros Regency has experienced a system shift, from previously still using a manual system, now has switched to the Village Financial System (Siskeudes). Although they have not yet conducted a trial, overall, village officials are interested in the prototype application design that researchers offer, namely the Pakdes application because it has a more flexible display of features and functions and can be reached by the general public. This strongly supports several service principles that should exist and be applied, one of which is the participatory principle which is expected to be tested immediately.

Keyword: Public Service Innovation; Village Funds; Pakdes Application

PENDAHULUAN

Pelayanan publik saat ini menjadi tolok ukur kinerja pemerintah terhadap pelayanan yang diterima dimana kinerja pemerintah dapat dinilai secara langsung oleh masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 merupakan tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat menciptakan suatu inovasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan data dari [Suwarno \(2008\)](#), pentingnya inovasi pada sektor publik ini juga mendapat pengakuan dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), dimana sejak tahun 2003 telah meluncurkan penghargaan United Nations Public Service Awards yang dirancang untuk meningkatkan peran, profesionalisme dan *visibility* dari pelayanan publik dengan tiga kategori dasar, yaitu transparansi dan akuntabilitas, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan aplikasi *e-government*.

Laporan pertanggungjawaban dana desa dalam realitanya mempunyai banyak kendala. Diungkapkan salah seorang pendamping dana desa, Aunul Khoir ([Achmad, 2018](#)), di antara kendala yang dialaminya yaitu kondisi geografis dimana akses dari desa ke kota harus melalui jarak yang cukup jauh, transportasi yang sulit, ditambah jaringan telekomunikasi atau untuk mengakses internet tidak ada. Selain itu, tenaga kerja juga sangat terbatas. Beberapa kepala desa di Yogyakarta mengeluh akibat sulitnya membuat

LPJ Dana Desa karena terdiri dari lembaran dokumen yang bertumpuk-tumpuk (Ariefna, 2018).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi, maka peneliti memberikan solusi berupa inovasi pelayanan melalui aplikasi PAKDES, yaitu aplikasi laporan dana desa kreatif berbasis *online*, yang saat ini masih berada pada tahap finalisasi aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2020. Hal ini berawal dari proses pelayanan yang diterapkan saat ini masih bersifat manual, sehingga diperlukan sebuah inovasi untuk melakukan pelaporan secara efisien dan efektif dengan melibatkan hubungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi PAKDES yang berfokus pada laporan pertanggungjawaban dana desa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada agar transparansi dan akuntabilitas dana desa bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya yaitu melaporkan secara terbuka kepada masyarakat baik itu secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik menurut Lewis dan Gilman ([Nugroho, 2017](#)) adalah pelaksanaan pelayanan dengan penuh tanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar terwujudnya pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan memerhatikan nilai akuntabilitas dalam pemberian pelayanan berdasar pada aspek pertanggungjawaban dengan memberikan pelayanan sesuai kaidah kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan Publik dari model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration/OPA*) ke model manajemen publik baru (*New Public Management/NPM*) dan akhirnya menuju pada model pelayanan publik baru (*New Public Service/NPS*). Menurut [Setyaningrum \(2009\)](#), pergeseran tahapan pelayanan Publik ini melalui tahapan yang panjang, dimana tahapan baru yang muncul merupakan kritik terhadap tahapan sebelumnya yang dianggap kurang sempurna.

Metode pelayanan dalam inovasi merupakan perubahan baru yang dapat dilihat pada interaksi orang lain dalam menghasilkan dan memberikan pelayanan yang baik. Visi, misi, tujuan serta strategi baru merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan dengan

berdasar pada realitas yang ada. Hal lain yang kini juga berkembang dalam inovasi yaitu interaksi sistem yang dengan cara baru atau yang telah diperbarui dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau dapat disebut adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

[Rogers \(2003\)](#) memberikan gambaran mengenai proses inovasi sebagai proses pengurangan ketidakpastian, dan dia mengusulkan atribut inovasi yang membantu mengurangi ketidakpastian tentang inovasi. Maka dari itu, diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik baru (*New Public Service*) dengan mengutamakan kepentingan publik sebagai tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2019 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melakukan sebuah penemuan yang akurat, maka peneliti menggunakan teori inovasi di sektor publik dari Everett M. Rogers (2003) yang memiliki 5 atribut inovasi, yaitu *Relative Advantages*, *Compatibility*, *Complexity*, *Trialability*, dan *Observability*. Peneliti lalu menggunakan atribut inovasi dari Rogers (2003) untuk melihat tingkat efektivitas dan efisiensi dari aplikasi yang ditawarkan, yaitu aplikasi Pakdes dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif.

1. *Relative Advantages* (Keunggulan Relatif)

Rogers (2003) mendefinisikan keunggulan relatif sebagai acuan dalam melihat proses inovasi apakah akan lebih baik dari inovasi yang telah ada sebelumnya.

2. *Compatibility* (Kesesuaian)

Dalam beberapa penelitian difusi, keunggulan relatif dan kompatibilitas dipandang serupa, meskipun secara konseptual berbeda. Rogers (2003) menyatakan bahwa kompatibilitas adalah proses inovasi yang konsisten dengan nilai-nilai yang telah diterapkan sebelumnya, berpacu pada pengalaman masa sebelumnya, serta kebutuhan pengadopsi potensial.

3. *Complexity* (Kerumitan)

Rogers (2003) mendefinisikan kompleksitas dengan menitikberatkan inovasi pada sisi kerumitan dalam hal ini penggunaannya.

4. *Trialability* (Kemungkinan dicoba)

Menurut Rogers (2003), *trialability* (kemungkinan dicoba) adalah proses inovasi yang menitikberatkan pada uji lapangan atau uji coba produk inovasi.

5. *Observability* (Kemudahan diamati)

Rogers (2003) mendefinisikan observabilitas sebagai acuan dalam melihat kebermanfaatannya dalam proses pemberian pelayanan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada observasi awal dimana desa yang ada di Kecamatan Mallawa masih menerapkan sistem manual dan mengalami masalah keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Dan hal ini sesuai dengan apa yang peneliti akan kaji terhadap inovasi pelayanan publik melalui aplikasi PAKDES.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses pelayanan publik dalam laporan pertanggungjawaban dana desa yang diterapkan saat ini serta untuk mengetahui respon aparatur desa terhadap inovasi pelayanan yang ditawarkan yaitu aplikasi PAKDES di Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae Kecamatan Mallawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik (Aplikasi Dana Desa Kreatif Berbasis *Online* di Kecamatan Mallawa). Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari, menemukan dan menjelaskan secara keseluruhan hasil penelitian secara objektif dan mendalam ([Ghony, 2012](#)).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah kegiatan yang menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya dalam melakukan pengamatan ([Bungin, 2015](#)). Adapun observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan awal terkait bagaimana proses pelayanan publik yang diterapkan sebelumnya.
2. Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data dari informan melalui tanya jawab sambil bertatap muka ([Bungin, 2015](#)). Jadi, wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang inovasi pelayanan Publik (Aplikasi Dana Desa Kreatif Berbasis *Online* di Kecamatan Mallawa). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu ([Sugiyono, 2016](#)). Data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data berupa dokumen, administrasi,

maupun foto-foto atau gambar yang dijadikan sebagai lampiran dan data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yaitu data keuangan desa dan data-data terkait lainnya yang diperlukan di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Analisis data di lapangan menggunakan Model Miles dan Huberman ([Ghony, 2012](#)), yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan serta penyederhanaan data “kasar” yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan sekumpulan informasi yang telah diolah untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan adalah proses mencari arti benda-benda, pola-pola, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis secara ilmiah dan sistematis dengan menggunakan metode analisis dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), maka di peroleh beberapa informasi mengenai inovasi pelayanan publik berupa Aplikasi Pakdes sebagai laporan dana desa kreatif berbasis *online* di Kecamatan Mallawa, sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Publik dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Inovasi pada metode pelayanan merupakan perubahan baru dalam berinteraksi dengan orang lain atau cara baru dalam memberikan pelayanan yang baik. Inovasi dalam strategi ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru dengan alasan berdasar pada realitas yang ada. Hal lain yang kini juga berkembang yaitu inovasi dengan interaksi sistem yang meliputi cara baru atau yang telah diperbarui dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau dapat disebut adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Inovasi sektor publik bukan merupakan kondisi yang bisa sukses dijalankan dengan berdasar pada niat saja. Hal ini membutuhkan beberapa faktor kritis untuk menjamin keberhasilan dan keberlangsungannya. Tanpa adanya faktor-faktor ini, maka akan sulit untuk merealisasikan inovasi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu untuk

melakukan identifikasi dalam mengembangkan inovasi sektor publik. Beberapa faktor tersebut diantaranya kepemimpinan yang dapat mendukung inovasi, pengembangan tim dan kemitraan, budaya organisasi, pegawai yang terdidik dan terlatih, serta orientasi pada kinerja yang terukur.

Peneliti menemukan informasi melalui wawancara bahwa sistem pelayanan yang diterapkan sebelumnya merupakan sistem manual, yaitu melaporkan LPJ Dana Desa dengan membawanya langsung ke kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang digunakan selama periode yang ditetapkan.

Proses laporan pertanggungjawaban dana desa dilakukan selama 2 semester. Laporan pada periode semester 1 dilakukan sekitar bulan Juli periode kepengurusan yang berjalan. Sedangkan untuk laporan akhir atau laporan semester 2 dilakukan di awal tahun atau sekitar bulan Januari setelah melaksanakan program tahunan yang telah direncanakan oleh desa. Adanya proses laporan yang dilakukan dua kali atau dua semester selama setahun ini dilaksanakan setelah melakukan musyawarah terkait RPJM Desa. Setelah menghasilkan RKP, selanjutnya akan dilakukan penentuan APB Desa untuk program satu tahun ke depannya. Program yang telah direncanakan dapat berubah atau dapat pula ditambah di saat periode berjalan.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan pada arahan dari pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota ke desa. Perubahan ini yang akan dilaporkan pada pertengahan tahun berjalan atau sekitar bulan Juli sebagai laporan semester 1. Saat ini sistem pelaporan pertanggungjawaban dana desa telah beralih ke sistem yang lebih modern, yaitu melalui Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 ([BPKP, 2015](#)). Namun, Siskeudes ini baru mulai berjalan dan diterapkan ke seluruh desa Indonesia pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.

Selanjutnya, peneliti mulai menjelaskan mengenai rekomendasi inovasi aplikasi yang dikembangkan oleh peneliti dan timnya yang juga menjadi salah satu aplikasi untuk memudahkan aparatur desa dalam melaporkan LPJ Dana Desanya. Konsep aplikasi memiliki kesamaan dengan Siskeudes. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam proses pelaporan, fitur dan juga bagian lainnya yang tidak dimiliki oleh aplikasi Siskeudes. Aplikasi yang dikembangkan oleh peneliti yaitu aplikasi Pakdes, yang disebut sebagai aplikasi Dana Desa kreatif berbasis *Online*.

Berdasarkan hasil wawancara dari aparaturnya di Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae, peneliti menemukan data terkait sistem pelayanan yang telah berubah, khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang telah beralih ke sistem yang lebih modern dan lebih memudahkan aparaturnya desa. Suatu inovasi yang dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, yaitu Siskeudes menjadi salah satu terobosan baru dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti secara lebih lanjut juga memberikan penjelasan rinci terkait dengan inovasi yang ditawarkan, yaitu aplikasi Pakdes, yang juga berfokus pada laporan pertanggungjawaban dana desa. Perbedaannya, aplikasi ini dirancang sebagai salah satu media yang dapat memudahkan aparaturnya desa dalam melakukan pelaporan dana desa yang dapat diakses secara *online* melalui *smartphone*. Selain memudahkan aparaturnya desa, aplikasi ini juga dirancang bagi masyarakat desa yang dapat mengakses hasil laporan pertanggungjawaban masing-masing desa yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan dana desa yang tepat sasaran yang secara langsung akan mendukung terwujudnya prinsip transparansi pengelolaan dana desa.

Meskipun aplikasi ini diakses secara *online* melalui *smartphone*, masyarakat yang tidak memiliki akses secara *online* juga dapat melihat laporan pertanggungjawaban dana desa melalui Papan Informasi Digital yang juga dirancang khusus dan terkoneksi langsung dengan aplikasi. Pengadaan aplikasi dan Papan Informasi Digital diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi yang mampu menjadi media penghubung antara aparaturnya desa dan masyarakat untuk saling bersinergi mewujudkan proses kerja sama dalam mendukung pengembangan desa melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

2. Inovasi Pelayanan Publik (Pakdes: Aplikasi Dana Desa Kreatif Berbasis *Online* di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros)

Dalam penelitian ini, terdapat 5 indikator yang digunakan untuk melihat inovasi pelayanan publik. Indikator ini berdasar pada variabel dari teori [Rogers \(2003\)](#), yaitu *Relative Advantages* (Keunggulan Relatif), *Compatibility* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Trialability* (Kemungkinan dicoba), *Observability* (Kemudahan diamati). Metode penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur pengumpulan data dengan

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabaran data yang diperoleh, dapat dilihat pada penjelasan selanjutnya.

a. *Relative Advantages (Keunggulan Relatif)*

[Rogers \(2003\)](#) mendefinisikan keunggulan relatif sebagai sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan efektivitas dari aplikasi Pakdes itu sendiri berdasarkan pada hasil presentase mengenai aplikasi Pakdes. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan informasi bahwa aplikasi Pakdes memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dari Siskeudes. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan pilihan fitur yang disediakan. Untuk Siskeudes, meskipun juga dapat diakses secara *online*, namun dalam pelaporannya masih perlu melakukan 2 kali penginputan *database*. Sedangkan untuk aplikasi Pakdes, penginputan data cukup dilakukan satu kali saja. Hal ini tentu akan memudahkan dan juga dari segi penerapannya akan lebih efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae, maka cara kerja aplikasi Pakdes memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dari Siskeudes. Hal ini didasarkan pada cara kerja yang mudah dan dari sisi efisiensi juga tidak akan mengambil banyak waktu untuk melakukan penginputan data laporan pengelolaan keuangan desa.

Siskeudes telah diterapkan selama kurang lebih dua tahun. Sistem pengelolaan keuangan ini merupakan peralihan dari sistem manual yang diterapkan pada pelaporan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan, aplikasi ini diakui sangat membantu aparatur desa dalam melaporkan keuangan desa. Disamping itu, juga memberikan akses yang lebih mudah, membuat aparatur juga tidak lagi khawatir terlambat dalam melaporkan LPJ dana desannya.

Inovasi aplikasi Pakdes yang dikembangkan oleh peneliti juga berfokus pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain memiliki kesamaan dalam pengelolaan keuangan, aplikasi Pakdes juga memiliki fitur lain yang mendukung prinsip partisipatif dari masyarakat. Fitur ini berupa fitur saran dan kritik yang disediakan khusus untuk masyarakat secara umum dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman berbeda kepada aparatur desa dan juga

masyarakat dalam bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peneliti menemukan data bahwa Pakdes memiliki keunggulan dari segi penggunaan fitur yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Selain itu, Aplikasi Pakdes memiliki beberapa fitur yang sama dengan inovasi sebelumnya, yaitu fitur yang berfungsi untuk melaporkan perencanaan, penganggaran, hingga pembukuan. Namun, dari segi tampilan, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa fitur dan tampilan dari aplikasi Pakdes lebih menarik dan lebih mudah untuk diakses.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan **W**, aparaturnya dari Desa Barugae, yaitu:

Aplikasi yang Adek tawarkan ini tampilannya lebih menarik dan juga kekinian. Secara langsung, kami bisa memahami fitur-fitur dalam Aplikasi Pakdes. Ini sangat berpotensi diterapkan kedepannya. Tapi, tergantung juga pada kebijakan dari Pemerintah Daerah (**Wawancara 6 Juni 2021**).

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, informan yang kami wawancarai memiliki ketertarikan terhadap aplikasi Pakdes. Tampilan aplikasi ini berdasarkan pernyataan informan, lebih menarik dan kekinian. Alur pelaporan juga mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti juga memberikan pertanyaan serupa kepada beberapa aparaturnya desa di Desa Tellumpanuae, yaitu informan **M**, yang menyatakan bahwa:

Fitur-fiturnya kurang lebih fungsinya sama. Hanya mungkin nama-nama fitur yang berbeda. Fitur di aplikasi Pakdes ini juga lebih lengkap dan terpisah. Secara tampilan, mudah dipahami. Tapi karena masih dalam bentuk desain aplikasi, kami tidak tahu apakah memang aplikasi yang jadi nantinya akan mudah diakses. Tapi, sejauh ini kami melihat aplikasi ini akan mudah menyesuaikan untuk digunakan. Semoga proses kedepannya bisa dilancarkan dan bisa menjadi inovasi yang bisa diterapkan nantinya (**Wawancara 5 Juni 2021**).

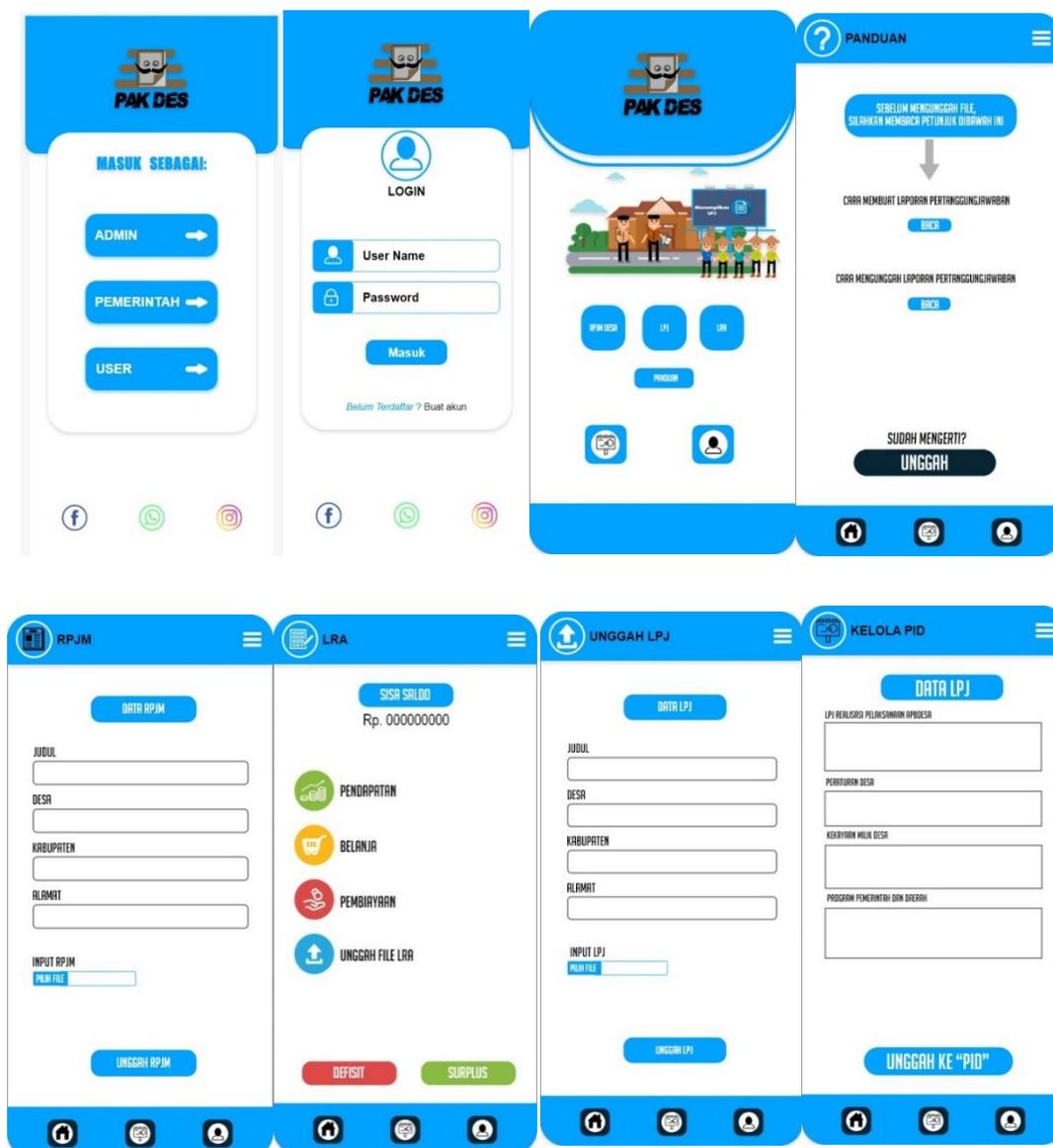
Selanjutnya, informan **DM** memberikan pernyataan tambahan, yaitu:

Pakdes ini bisa jadi inovasi yang berguna nantinya. Apalagi anak desa sini yang buat. Jika bisa melakukan koordinasi dan kerjasama langsung dengan pemerintah daerah, maka akan lebih bagus (**Wawancara 5 Juni 2021**).

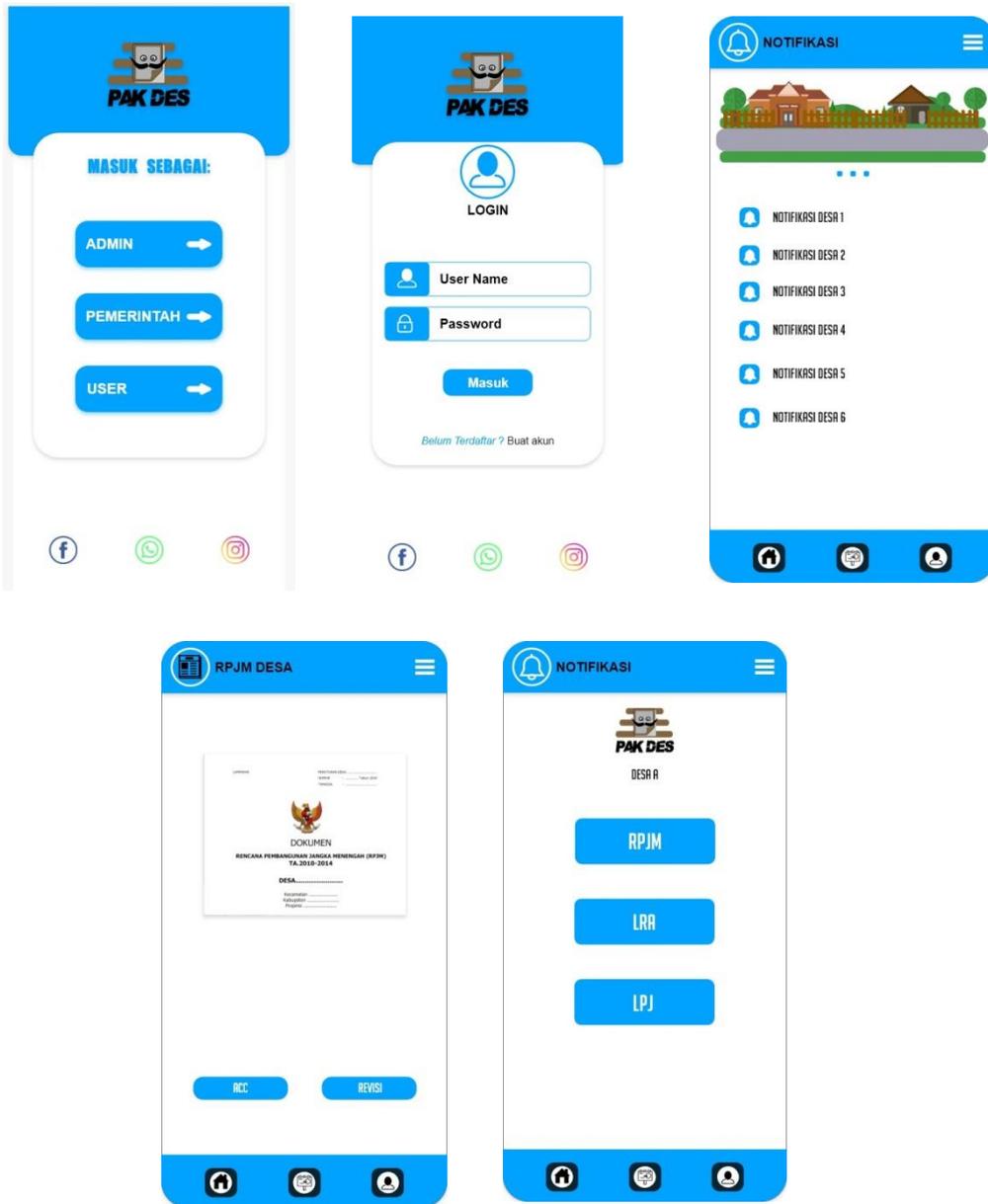
Secara umum, aplikasi Pakdes merupakan aplikasi pelengkap dan pengembangan dari konsep Siskeudes. Sebelum mengembangkan aplikasi Pakdes, peneliti melakukan riset terlebih dahulu pada tahun 2019 terkait aplikasi serupa yang juga berfokus pada

pengelolaan keuangan desa. Siskeudes ini ditemukan menjadi aplikasi yang sementara diterapkembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing memiliki keunggulan dalam segi pengembangannya. Aparatur desa juga melihat aplikasi Pakdes ini sebagai aplikasi yang mampu menjadi trobosan baru yang akan lebih memudahkan aparatur desa dan masyarakat yang akan bersinergi dalam mengelola keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat desa ke depannya. Selain itu, aplikasi Pakdes yang terintegrasi dengan PID (Papan Informasi Digital) juga akan menjadi awal semakin berkembangnya teknologi desa, khususnya dalam pengelolaan desa yang lebih makmur.

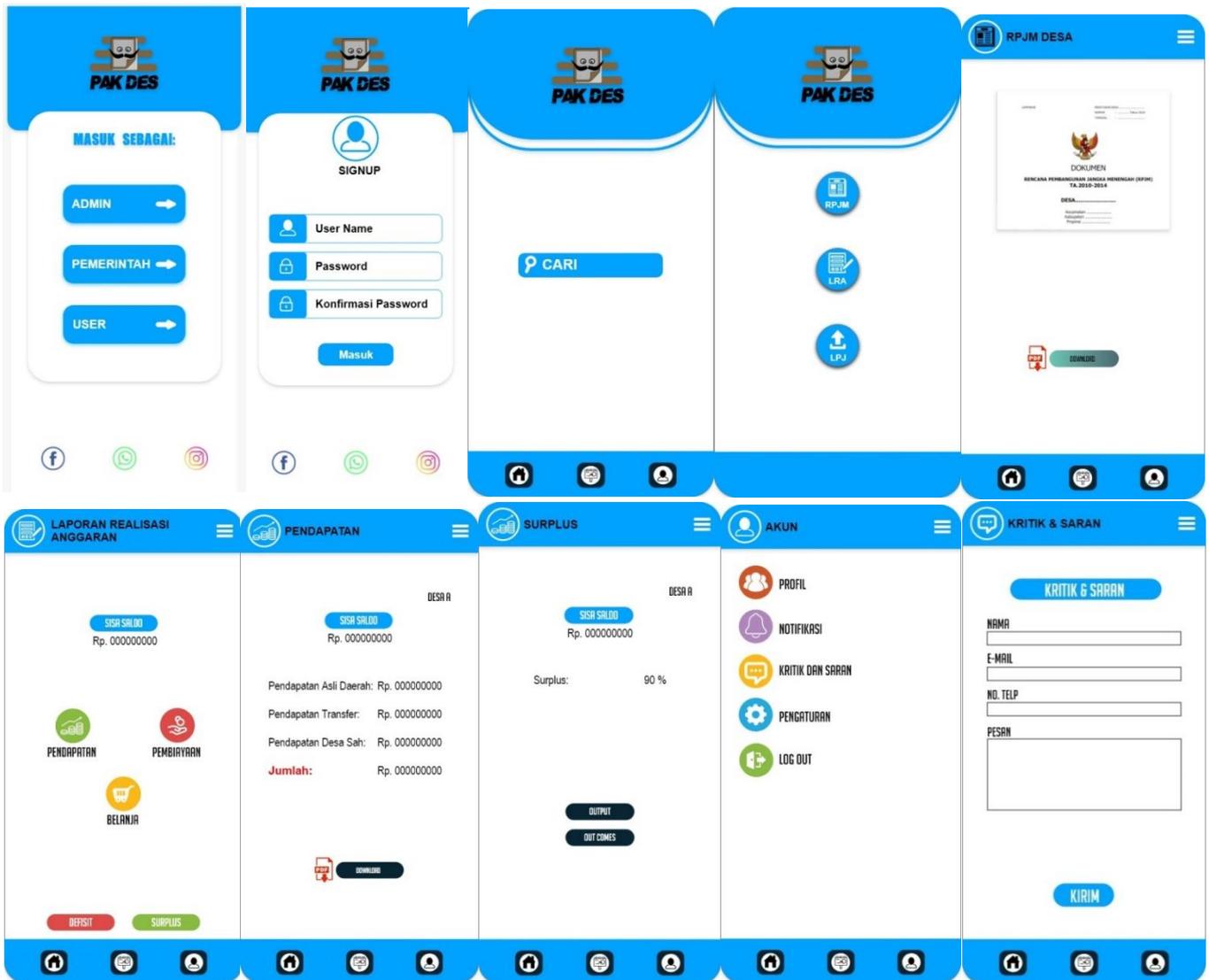
MASUK SEBAGAI APARATUR DESA



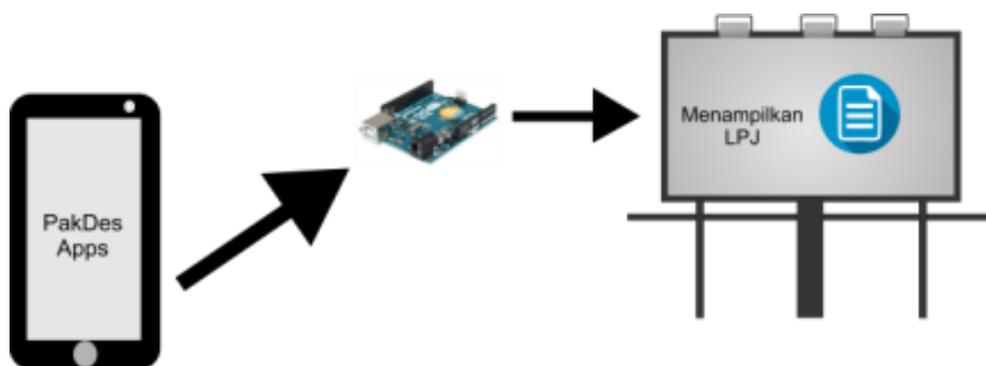
MASUK SEBAGAI PEMERINTAH KABUPATEN



MASUK SEBAGAI MASYARAKAT



Gambar 1. *Prototipe* Aplikasi PAKDES Versi 2



Gambar 2. *Prototipe* Papan Informasi Digital

Setelah melakukan presentasi mengenai aplikasi Pakdes, ditemukan data bahwa masyarakat Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae memiliki ketertarikan terhadap aplikasi ini. Beberapa aparaturnya mengakui bahwa tampilan aplikasi Pakdes berupa fitur-fitur yang ada lebih kekinian dan sangat *accessible* untuk semua kalangan. Bukan hanya aparaturnya desa, tapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Hal inilah yang membedakannya dengan aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan teori [Rogers \(2003\)](#) yang menjabarkan mengenai atribut inovasi, ditemukan bahwa saat ini masih perlu dilakukan pembaruan atau menghasilkan serta mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilandasi dari kondisi lapangan yang ternyata memang telah terjadi pergeseran sistem, yaitu diterapkannya Siskeudes sebagai inovasi baru dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Namun, jika menelisik dari kondisi ideal berdasar pada teori Rogers (2003), maka perlu untuk dilakukan pengembangan yang mampu mencakup 5 atribut inovasi, yaitu dengan adanya *Relative Advantages* (Keunggulan Relatif), *Compatibility* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Trialability* (Kemungkinan diuji coba), *Observability* (Kemudahan diamati).

b. *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi yang baik merupakan inovasi yang mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang telah digantikan atau telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak dilupakan begitu saja. Meskipun karena alasan biaya yang besar, namun inovasi yang lama menjadi bagian penting dari proses transisi ke inovasi yang baru. Hal ini dapat memudahkan proses adaptasi terhadap inovasi yang baru secara lebih cepat.

Siskeudes telah diterapkan selama kurang lebih dua tahun. Sistem pengelolaan keuangan ini merupakan peralihan dari sistem manual yang diterapkan pada pelaporan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan, aplikasi ini diakui sangat membantu aparaturnya desa dalam melaporkan keuangan desa. Disamping itu, juga memberikan akses yang lebih mudah, membuat aparaturnya juga tidak lagi khawatir terlambat dalam melaporkan LPJ dana desannya.

Inovasi aplikasi Pakdes yang dikembangkan oleh peneliti juga berfokus pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain memiliki kesamaan dalam pengelolaan keuangan, aplikasi Pakdes juga memiliki fitur lain yang mendukung prinsip

partisipatif dari masyarakat. Fitur ini berupa fitur saran dan kritik yang disediakan khusus untuk masyarakat secara umum dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman berbeda kepada aparatur desa dan juga masyarakat dalam bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peneliti menemukan data bahwa Siskeudes dan Pakdes memiliki kesesuaian fungsi, yaitu fitur yang berfungsi untuk melaporkan perencanaan, penganggaran, hingga pembukuan. Namun, dari segi tampilan, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa fitur dan tampilan dari aplikasi Pakdes lebih menarik dan lebih mudah untuk diakses.

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan, informan yang kami wawancarai memiliki ketertarikan terhadap aplikasi Pakdes. Tampilan aplikasi ini berdasarkan pernyataan informan, lebih menarik dan kekinian. Alur pelaporan juga mudah dipahami.

Secara umum, aplikasi Pakdes merupakan aplikasi pelengkap dan pengembangan dari konsep Siskeudes. Sebelum mengembangkan aplikasi Pakdes, peneliti melakukan riset terlebih dahulu pada tahun 2019 terkait aplikasi serupa yang juga berfokus pada pengelolaan keuangan desa. Siskeudes ini ditemukan menjadi aplikasi yang sementara dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing memiliki keunggulan dalam segi pengembangannya. Aparatur desa juga melihat aplikasi Pakdes ini sebagai aplikasi yang mampu menjadi terobosan baru yang akan lebih memudahkan aparatur desa dan masyarakat yang akan bersinergi dalam mengelola keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat desa ke depannya.

Tabel 1.4
Perbedaan Fitur Siskeudes dan Aplikasi Pakdes

Fitur	Siskeudes	Pakdes
Tampilan bentuk Website	√	-
Tampilan bentuk Aplikasi	-	√
User/ Pengguna (Aparatur Desa)	√	√
User/ Pengguna (Pemerintah Daerah)	-	√
User/ Pengguna (Masyarakat)	-	√
Alur Pelaporan/Panduan	√	√
RPJM Desa/Perencanaan	√	√
LRA/Penganggaran	√	√

Penatausahaan	√	-
LPJ/Pembukuan	√	√
Saran/Kritik	-	√
Notifikasi LPJ	-	√
Hasil Evaluasi LPJ (ACC/REVISI)	-	√
Pengelolaan Papan Informasi <i>Digital</i>	-	√

Peneliti menemukan data bahwa Siskeudes dan Pakdes memiliki kesesuaian fungsi, yaitu fitur yang berfungsi untuk melaporkan perencanaan, penganggaran, hingga pembukuan. Namun, dari segi tampilan, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa fitur dan tampilan dari aplikasi Pakdes lebih menarik, lebih lengkap, dan lebih mudah untuk diakses.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, hal ini sangat sejalan dengan teori Christensen & Laergreid (2001), terkait kategori inovasi yaitu *Sustaining Innovation*, dimana proses inovasi yang membawa perubahan baru harus tetap berdasar pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau yang sudah ada.

Fitur-fitur antara kedua aplikasi ini kurang lebih fungsinya sama. Perbedaannya hanya terletak pada fitur-fitur aplikasi. Beberapa Aparatur Desa melihat Fitur di aplikasi Pakdes lebih lengkap dan terpisah dimana secara tampilan, mudah untuk dipahami. Dari beberapa keunggulan tersebut maka aplikasi Pakdes memiliki peluang untuk dipertimbangkan ke depannya melalui koordinasi dan kerja sama langsung dengan pemerintah daerah.

Secara umum, aplikasi Pakdes merupakan aplikasi pelengkap dan pengembangan dari konsep Siskeudes. Sebelum mengembangkan aplikasi Pakdes, peneliti melakukan riset terlebih dahulu pada tahun 2019 terkait aplikasi serupa yang juga berfokus pada pengelolaan keuangan desa. Siskeudes ini ditemukan menjadi aplikasi yang sementara dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing memiliki keunggulan dalam segi pengembangannya. Aparatur desa juga melihat aplikasi Pakdes ini sebagai aplikasi yang mampu menjadi terobosan baru yang akan lebih memudahkan aparatur desa dan masyarakat yang akan bersinergi dalam mengelola keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat desa kedepannya. Selain itu, aplikasi Pakdes yang teintegrasi dengan PID (Papan Informasi *Digital*) juga akan menjadi awal semakin berkembangnya teknologi desa, khususnya dalam pengelolaan desa yang lebih makmur.

c. Complexity (Kerumitan)

Inovasi yang baru biasanya memiliki tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun, inovasi yang baru menawarkan cara yang lebih baik, sehingga pada umumnya tidak terlalu menjadi masalah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, aplikasi Pakdes memiliki tingkat kerumitan hanya dari segi penyesuaian fitur yang lebih banyak dari Siskeudes.

Aplikasi Pakdes dikembangkan oleh peneliti berasas pada 3 prinsip dalam laporan pertanggungjawaban dana desa, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipatif. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah termuat dalam Siskeudes, sedangkan dalam aplikasi Pakdes, memuat ketiga prinsip di atas. Aplikasi Pakdes dikembangkan dengan melakukan pemilihan fitur yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh aparatur desa. Selain itu, pengembangan aplikasi ini menitikberatkan pada kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mengawal pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, terkait dengan efektivitas dari aplikasi Pakdes itu sendiri berdasarkan pada hasil presentase mengenai aplikasi Pakdes. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan informasi bahwa Aplikasi Pakdes memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dari Siskeudes. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan pilihan fitur yang disediakan. Untuk Siskeudes, meskipun juga dapat diakses secara *online*, namun dalam pelaporannya masih perlu melakukan 2 kali penginputan *database*. Sedangkan untuk aplikasi Pakdes, dapat dilakukan satu kali penginputan saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae maka cara kerja aplikasi Pakdes memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dari Siskeudes. Hal ini didasarkan pada cara kerja yang mudah dan dari sisi efisiensi juga tidak akan mengambil banyak waktu untuk melakukan penginputan data laporan pengelolaan keuangan desa.

d. Trialability (Kemungkinan dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

Proses pergantian sistem pelaporan berdasarkan akan sulit untuk dilakukan. Merujuk pada Siskeudes, yang baru diterapkan dan masih dalam tahap berkembang, jika dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensi dari aplikasi Pakdes, maka aplikasi Pakdes unggul

dalam hal tersebut. Tapi hal ini juga hanya berdasar pada desain dan cara kerja. Perlu untuk dilakukan uji coba untuk mengetahui proses dan alur serta tingkat efektivitas dan efisiensi secara komprehensif dari aplikasi Pakdes.

e. *Observability* (Kemudahan diamati)

[Rogers \(2003\)](#) mendefinisikan observabilitas sebagai sejauh mana hasil inovasi terlihat oleh orang lain. Sebuah inovasi juga harus dapat diamati, mulai dari segi bagaimana ia bekerja dan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hal ini juga berlaku pada Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada sektor daerah.

Terkait dengan aplikasi Pakdes dan dari sisi kemudahannya untuk diamati, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa mereka belum bisa memberikan tanggapan yang pasti. Hal ini didasarkan pada aplikasi yang masih berada pada tahap pengembangan desain (*prototype*) dan belum diuji coba, sehingga akan sulit untuk memberikan penilaian terkait kemudahan penggunaan aplikasi.

Data ditemukan bahwa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban yang diterapkan di Desa Tellumpanuae dan juga Desa Barugae saat ini masih dalam tahap menerapkembangkan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) sebagai wadah yang digunakan dalam melaporkan beberapa laporan terkait keuangan desa pada periode yang sedang berjalan. Secara keseluruhan, aparat desa memiliki ketertarikan dengan aplikasi yang peneliti tawarkan, yaitu aplikasi Pakdes karena memiliki tampilan fitur dan fungsi yang lebih fleksibel dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum. Hal ini sangat mendukung beberapa prinsip pelayanan yang seharusnya ada dan diterapkan, salah satunya prinsip partisipatif. Prinsip ini seringkali menjadi dilema antara penerapan sistem pelayanan yang baik, karena meskipun telah terjadi pergeseran inovasi pelayanan, namun pada hakikatnya masyarakat belum menjadi skala prioritas dalam proses pelayanan yang ada. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi Pakdes, hal ini akan menjadi pintu pembuka dimana pemerintah dalam hal ini aparat desa dan masyarakat dapat saling bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Dari penjabaran hasil dan pembahasan, aplikasi Pakdes memenuhi kriteria inovasi berdasarkan atribut inovasi oleh Rogers (2003), yang meliputi:

1. *Relative Advantages* (Keunggulan Relatif)

Berdasarkan data yang diperoleh, jika menelisik dari sisi keunggulan, maka diperoleh hasil bahwa aplikasi Pakdes memiliki beberapa aspek yang lebih unggul dari

Siskeudes. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2. *Compability* (Kesesuaian)

Pengembangan aplikasi Pakdes merupakan bagian dari pelengkap sistem yang saat ini diterapkan, yaitu Siskeudes, sehingga aplikasi Pakdes memiliki kesesuaian fungsi dengan sistem yang diterapkan pada Siskeudes dalam beberapa fungsi fitur yang disediakan dalam sistem. Sehingga inovasi pelayanan publik yang baru, dalam hal ini aplikasi Pakdes akan menjadi inovasi yang mudah untuk diakses. Hal ini berdasar pada pemilihan fitur yang mengikut pada *trend* tampilan aplikasi pada umumnya, yang *accessible* untuk digunakan oleh semua kalangan di mana pun dan kapan pun.

3. *Complexity* (Kerumitan)

Merujuk pada hasil data yang diperoleh, aplikasi Pakdes memiliki tingkat kerumitan yang terletak pada penggunaan fitur. Hal ini karena fitur dalam aplikasi Pakdes lebih banyak sehingga perlu untuk melakukan penyesuaian penggunaan. Namun, hal ini dapat ditaktisi dengan menggunakan pedoman yang juga telah disediakan secara otomatis dalam aplikasi Pakdes. Sehingga penggunaannya pun dapat dipahami dalam waktu yang cepat dan menyesuaikan dengan proses adaptasi dari pengguna.

4. *Trialability* (Kemungkinan dicoba)

Merujuk pada Siskeudes yang baru diterapkan dan masih dalam tahap berkembang, jika dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensi dari aplikasi Pakdes, maka aplikasi Pakdes unggul dalam hal tersebut. Tapi hal ini juga hanya berdasar pada desain dan cara kerja. Perlu untuk dilakukan uji coba untuk mengetahui proses dan alur serta tingkat efektivitas dan efisiensi secara komprehensif dari aplikasi Pakdes.

5. *Observability* (Kemudahan diamati)

Terkait dengan Aplikasi Pakdes dan dari sisi kemudahannya untuk diamati, beberapa informan memberikan tanggapan bahwa mereka belum bisa memberikan tanggapan yang pasti. Hal ini berdasar pada Aplikasi yang masih berada pada tahap pengembangan desain (*prototype*) dan belum di uji coba, sehingga akan sulit untuk memberikan penilaian terkait kemudahan penggunaan aplikasi secara akurat. Maka dari itu, perlu untuk melakukan uji coba dan juga implementasi dari aplikasi Pakdes.

PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai inovasi pelayanan publik (PAKDES: Aplikasi Dana Desa Kreatif Berbasis *Online* di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros) dengan berdasar pada penyajian data, analisis data dan interpretasi data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae telah mengalami pergeseran sistem dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual, kini telah beralih ke sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem yang saat ini diterapkan tidak lagi menyulitkan masyarakat desa dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, kekurangannya operator harus mengirim dua kali *database* yang telah di *input* ke Siskeudes. Setelah melakukan penginputan data ke aplikasi, operator juga harus menyiapkan *database* untuk dikirim terpisah ke PEMDES melalui *WhatsApp*.
2. Aplikasi Pakdes memenuhi kriteria inovasi berdasarkan atribut inovasi, yaitu *Relative Advantages* (Keunggulan Relatif), *Compatibility* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Trialability* (Kemungkinan dicoba), *Observability* (Kemudahan diamati). Secara keseluruhan, aparatur desa memiliki ketertarikan dengan aplikasi yang peneliti tawarkan, yaitu aplikasi Pakdes karena memiliki tampilan fitur dan fungsi yang lebih feleksibel dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum. Hal ini sangat mendukung beberapa prinsip pelayanan yang seharusnya ada dan diterapkan, salah satunya prinsip partisipatif. Prinsip ini seringkali menjadi dilemma antara penerapan sistem pelayanan yang baik, karena meskipun telah terjadi pergeseran inovasi pelayanan, namun pada hakikatnya masyarakat belum menjadi skala prioritas dalam sistem pelayanan yang ada. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi Pakdes, hal ini akan menjadi pintu pembuka dimana pemerintah dalam hal ini aparatur desa dan masyarakat dapat saling bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [Achmad, E. 2018. *Ini Kendala Desa dalam Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa*. URL: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/28/ini-kendala-desa-dalam-membuat-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa>. Diakses tanggal 7 November 2019.](https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/28/ini-kendala-desa-dalam-membuat-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa)
- Albury, David. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Discussion Paper. The Mall. London.
- [Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.](#)
- [BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.](#)
- Eman, T. 2019. *Desa di TTU Belum Masukkan LPJ Pengelolaan Dana Desa*. URL: <https://voxntt.com/2019/05/20/103-desa-di-ttu-belum-masukkan-lpj-pengelolaan-dana-desa/46108/>. Diakses tanggal 7 November 2019.
- [Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jokjakarta: Ar-Ruzz Media. \(2\)](#)
- [Muluk, K. 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jatim: Bayumedia Publisng](#)
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [Nugroho, Ryant. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik-Hayat*. Depok: Rajawali Pers.](#)
- Nur F., Diah. 2014. Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass Sistem dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 2 (1): Hal. 1-10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Pelayanan Publik*. Undang-undang Nomor 25: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Dana Desa*. Undang-undang Nomor 60: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Desa*. Undang-undang Nomor 6: Jakarta.
- Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalam <http://bppk.kemenkeu.go.id/> diakses 20 September 2020.
- [Rogers, E.M. 2003. *Diffusion of innovations* \(3th ed.\). New York: Free Press. \(2\) \(3\) \(4\) \(5\)](#)
- [Setyaningrum, Erna. 2009. *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya : Medika Aksara Globalindo](#)
- Setyoko, P. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 11: 14-24.

Sinambela, dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

[Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.](#)

Sumarna, A. 2015. *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa – Informasi Khusus Seputar Pengelolaan Keuangan Desa*. URL: <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html>. Di akses tanggal 6 Desember 2019.

United Nations, 2005. *Innovations in the Public sector: Compendium of Best Practices*. UNDESA. New York.